Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkuangan Universitas Bangka Belitung

Yeni Yuliani, Universitas Bangka Belitung
anayuliaa529@gmail.com
Zizi Zalianti, Universitas Bangka Belitung
zizizalianti05@gmail.com
Adinda Khoirunnisa, Universitas Bangka Belitung
adindakhoirunnisa54 @gmail.com
Anisa Aprilia Kirana, Universitas Bangka Belitung
anisakiran82@ubb.ac.id
Aurelia Oktarina, Universitas Bangka Belitung
oktarinaaurellia28@ubb.ac.id
Alifa Malika, Universitas Bangka Belitung
alifamlka28@ubb.ac.id

Abstract

Implementing Smoke-Free Zones (KTR) in higher education institutions is essential for fostering a healthy and conducive academic atmosphere. This descriptive qualitative study aims to analyze the level of understanding among Universitas Bangka Belitung (UBB) students regarding KTR regulations and their perceptions of violations, as well as to formulate enforcement strategies. Data were gathered through in-depth interviews with five students at strategic campus locations. The findings indicate that students possess a range of understanding—from basic to comprehensive—regarding KTR policies as outlined in Law No. 36/2009, Government Regulation No. 109/2012, and UBB Rector Regulation No. 10/2019. However, a gap remains between understanding and compliance due to a lack of signage and weak monitoring in secluded areas. Effective KTR enforcement requires strengthening social control (peer enforcement), clearly communicating physical zoning, establishing a supervisory task force, and consistently applying a system of graduated administrative sanctions.

Keywords: *Smoke-Free Zones (KTR), Student Understanding, Right to a Healthy Environment, Higher Education, Administrative Law Enforcement.*

Abstrak

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perguruan tinggi penting untuk menciptakan atmosfer akademik yang sehat dan kondusif. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) terhadap regulasi KTR, persepsi pelanggaran, serta merumuskan strategi penegakannya. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap lima mahasiswa di lokasi strategis kampus. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa memiliki pemahaman dasar hingga komprehensif mengenai KTR sesuai UU No. 36/2009, PP No. 109/2012, dan Peraturan Rektor UBB No. 10/2019. Namun, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman dan kepatuhan akibat minimnya marka KTR serta lemahnya pengawasan di area tersembunyi. Penegakan KTR yang efektif membutuhkan penguatan kontrol sosial (*peer enforcement*), sosialisasi zonasi fisik yang jelas, pembentukan Satgas pengawas, dan penerapan sanksi administratif bertahap secara konsisten.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Pemahaman Mahasiswa, Hak Lingkungan Sehat, Perguruan Tinggi, Penegakan Hukum Administrasi.

A. Pendahuluan

Bahaya perilaku merokok terhadap kesehatan masyarakat telah menjadi perhatian global yang memerlukan penanganan secara terstruktur dan berkelanjutan. Asap rokok tidak hanya berdampak buruk bagi perokok aktif, melainkan juga menimbulkan risiko kesehatan yang sangat serius bagi perokok pasif yang terpapar zat toksik di lingkungan sekitar. Paparan zat karsinogenik dari asap rokok lingkungan terbukti meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, gangguan pernapasan kronis, hingga kanker paru-paru pada individu non-perokok. Oleh karena itu, pengendalian konsumsi tembakau melalui proteksi lingkungan dari paparan asap rokok menjadi agenda prioritas dalam pembangunan kesehatan di tingkat nasional maupun daerah.[1]Sebagai bentuk komitmen nyata dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Peraturan ini secara eksplisit mengamanatkan pembentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada berbagai tatanan, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. Peraturan ini secara eksplisit mengamanatkan pembentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada berbagai tatanan, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya.Penetapan fasilitas pendidikan sebagai salah satu tatanan utama KTR menegaskan bahwa institusi pendidikan harus menjadi lingkungan yang steril dari aktivitas merokok guna mendukung terciptanya atmosfer akademik yang sehat dan kondusif. Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewajiban moral dan legal untuk menerapkan norma-norma KTR di lingkungan kampusnya.

Keberadaan regulasi KTR di tingkat universitas bertujuan untuk menciptakan iklim belajar yang bersih, aman, dan nyaman bagi seluruh civitas akademika, khususnya mahasiswa. Namun, implementasi kebijakan publik di lingkungan kampus sering kali menghadapi tantangan kompleks yang bersumber dari variasi persepsi, pengetahuan, serta sikap mahasiswa terhadap urgensi aturan tersebut.[2]Efektivitas penerapan KTR di kampus sangat bergantung pada pemahaman serta tingkat kepatuhan mahasiswa sebagai populasi terbesar. Pemahaman mahasiswa mengenai aturan KTR tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kepatuhan mereka untuk tidak merokok di area terlarang. Banyak mahasiswa yang memahami adanya larangan merokok di kampus, tetapi tetap melakukan pelanggaran karena menganggap sanksi yang diterapkan kurang tegas atau akibat norma sosial sebaya yang mentoleransi perilaku merokok.

---

[1] Aditya Dandy Firatama, Raihan Firdaus, and Efendi Pratama Putra, 'Perencanaan Ruang Gersang Menjadi Taman Edukasi Dekarbonisasi Dan Ruang Perokok Ramah Lingkungan Di Universitas Annuqayah', *Agregat*, 11.1 (2026), 14564–71 <https://doi.org/10.30651/ag.v11i1.31529>.

[2] Wildan Nur Hidayat and others, 'Manajemen Kawasan Tanpa Rokok Berbasis Pendidikan Islam Di Perguruan Tinggi', *JMiE (Journal of Management in Education)*, 10.2 (2025), 69–82 <https://doi.org/10.30631/jmie.2025.102.69-82>.

Hal ini menunjukkan adanya celah (gap) yang cukup signifikan antara pemahaman normatif terhadap regulasi dan perilaku nyata di lapangan.[3]Selain faktor kesadaran individu, dinamika sosial di lingkungan perguruan tinggi juga turut memengaruhi preferensi perilaku merokok mahasiswa. Tekanan dari kelompok sebaya (peer pressure) serta pencarian identitas diri di jenjang usia mahasiswa sering kali menjadi pemicu utama timbulnya kepatuhan yang rendah terhadap aturan KTR. Mahasiswa yang merokok kerap menjadikan area-area tertentu di kampus seperti kantin, sudut parkir, atau gazebo sebagai tempat berkumpul sambil merokok tanpa memedulikan batasan KTR yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola kampus. Di sisi lain, kejelasan sosialisasi dan ketersediaan media informasi mengenai batasan wilayah KTR memainkan peranan vital dalam membentuk pemahaman mahasiswa. Ketidaktahuan mahasiswa mengenai batas-batas pasti zonasi KTR sering dijadikan alasan utama saat terjadi pelanggaran.

Tanpa dukungan marka jalan, papan imbauan, serta baliho edukasi yang memadai di titik-titik strategis universitas, penerapan kebijakan KTR akan rentan mengalami kegagalan akibat ketidakjelasan informasi di tingkat akar rumput.[4]Pengawasan yang konsisten dari Satuan Tugas (Satgas) KTR atau jajaran keamanan kampus juga menjadi variabel kunci yang menentukan sejauh mana norma KTR dihormati oleh mahasiswa. Kebijakan KTR yang tidak disertai dengan sistem pemantauan dan pemberian penalti yang konsisten cenderung diabaikan oleh civitas akademika. Ketika mahasiswa melihat tidak adanya konsekuensi nyata atas pelanggaran yang dilakukan, tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut akan menurun secara drastis dari waktu ke waktu.Pentingnya pemahaman mahasiswa terhadap KTR tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan fisik, melainkan juga berhubungan erat dengan pembentukan budaya organisasi dan etika akademis di Universitas Bangka Belitung.

Keterlibatan aktif mahasiswa dalam mendukung program KTR dapat menciptakan partisipasi kolektif yang positif dalam membangun kampus hijau (green campus) dan ramah lingkungan ketika mahasiswa secara mandiri menginternalisasi nilai-nilai kesehatan dan kebersihan lingkungan.[5]Pengaruh media digital dan jaringan komunikasi kampus juga memiliki andil dalam membentuk tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap isu-isu kesehatan lingkungan. Penyampaian pesan edukasi KTR melalui media sosial universitas, aplikasi pesan singkat, serta portal mahasiswa terbukti lebih efektif menjangkau generasi muda dibandingkan metode konvensional. Pendekatan edukasi yang interaktif dan visual mampu meningkatkan kesadaran (awareness) mahasiswa secara signifikan serta membentuk norma kelompok yang menolak paparan asap rokok di area publik kampus.[6]

---

[3] Arifin Shaleh Lubis and Putra Apriadi Siregar, 'Faktor Pendorong Perilaku Merokok Pada Mahasiswa Di Lingkungan Kampus: Pendekatan Kualitatif', *JK: Jurnal Kesehatan*, 1.4 (2023), 215–29.

[4] Rizky Aulia Simangunsong and others, 'Analisis Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Kampus UINSU Tuntungan', *Indonesian Journal of Health Science*, 4.4 (2024), 324–31 <https://doi.org/10.54957/ijhs.v4i4.916>.

[5] Yana Agus Setianingsih, Endang Wahyati, and Widyorini Endang, 'Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sebagai Bagian Dari Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus Pada STIKES Di Kota Semarang)', *Jurnal Hukum Kesehatan*, 1.1 (2020), 106–14.

[6] Ainal Mardhiah and Roma Sitio, 'PENERAPAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KAMPUS SEBAGAI PROSES BERKELANJUTAN : STUDI KUALITATIF', 3.3 (2026), 493–506.

Selain itu, faktor latar belakang personal dan tingkat pendidikan awal mahasiswa juga memengaruhi cara mereka merespons kebijakan KTR. Pengetahuan dasar mengenai bahaya bahan adiktif yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya menentukan sikap kritis mahasiswa saat memasuki dunia perguruan tinggi. Mahasiswa yang memiliki literasi kesehatan baik cenderung lebih mendukung penerapan KTR dan bersikap proaktif dalam mengingatkan sesama rekan agar tidak merokok di sembarang tempat. [7]Tantangan penerapan KTR di Universitas Bangka Belitung juga tidak lepas dari kondisi geografi dan tata ruang kampus yang luas. Luasnya area terbuka hijau di kampus sering kali menjadi celah bagi mahasiswa untuk melakukan aktivitas merokok secara tersembunyi jauh dari jangkauan pengawasan institusi.

Oleh karena itu, penguatan efektivitas KTR membutuhkan pendekatan holistik yang mengombinasikan strategi regulatif, pengadaan fasilitas pendukung, serta edukasi publik secara masif.[8]Penelitian ini membawa manfaat akademis yang signifikan dengan menyumbang literatur ilmiah mengenai evaluasi kebijakan publik di bidang kesehatan pada tatanan perguruan tinggi. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis data (evidence-based policy) bagi manajemen Universitas Bangka Belitung dalam menyempurnakan strategi sosialisasi KTR.Pada akhirnya, penelitian ini berorientasi untuk mendorong terwujudnya lingkungan kampus Universitas Bangka Belitung yang bersih, sehat, bebas dari asap rokok, serta kondusif bagi seluruh kegiatan akademik.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menitikberatkan pada analisis pemahaman dan persepsi mahasiswa terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Universitas Bangka Belitung (UBB). Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana mahasiswa mengartikan regulasi, norma hukum, serta dinamika kepatuhan di area kampus. Penelitian tidak bertujuan untuk mengukur variabel secara statistik quantitative, melainkan menguraikan fenomena interaksi sosial dan pemahaman hukum secara deskriptif-analitis.[9]Lokasi penelitian dilaksanakan di lingkungan kampus Universitas Bangka Belitung, khususnya pada titik-titik strategis yang menjadi pusat kegiatan dan interaksi sosial mahasiswa, yaitu kantin, gazebo kampus, dan area parkiran. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa area-area terbuka tersebut kerap menjadi lokasi berpotensi terjadinya pelanggaran zonasi KTR.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) mahasiswa Universitas Bangka Belitung yang dipilih secara purposive berdasarkan kesediaan dan kerepresentatifannya dalam memberikan gambaran fenomena di lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) secara langsung menggunakan pedoman

[7] Linda Suwarni, 'Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia', 1.18 (2015), 46–53.
[8] Sri Umriani Alisi and Nanda Labado, 'Hubungan Paparan Promosi Kesehatan Dengan Perubahan Perilaku Merokok Pada Mahasiswa', *Jurnal Promosi, Komunikasi & Kesehatan (SiKomKes)*, 1.2 (2025), 109–21.
[9] Lubis and Siregar.

wawancara terstruktur yang mencakup topik pengetahuan regulasi, persepsi atas pelanggaran, hingga usulan mekanisme sanksi. Selain data primer, penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 36 Tahun 2009, PP No. 109 Tahun 2012, dan Peraturan Rektor UBB No. 10 Tahun 2019) serta literatur ilmiah pendukung. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu pemahaman konsep KTR, urgensi implementasi, keterkaitan hak dan kewajiban, serta persepsi pelanggaran.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman dan Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Konsep KTR di Lingkungan UBB

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kelima informan, seluruh subjek pada dasarnya memiliki pemahaman mendasar bahwa Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya untuk menciptakan ruang akademis yang bebas dari paparan asap rokok demi kenyamanan dan kesehatan bersama. Informan 1, 3, 4, dan 5 menyoroti KTR sebagai instrumen perlindungan hak mahasiswa atas udara bersih di titik-titik krusial seperti ruang kelas, mushola, kantin, dan gazebo. Sementara itu, Informan 2 memberikan pemahaman yang komprehensif dengan mendefinisikan KTR tidak sekadar larangan membakar rokok, melainkan mencakup pembatasan kegiatan memproduksi, menjual, hingga mengiklankan produk tembakau di tatanan akademik kampus.

Pemahaman mahasiswa yang mengaitkan KTR dengan perlindungan lingkungan fisik dan atmosfer belajar ini memiliki landasan yuridis yang sangat kuat dalam hukum positif Indonesia. Secara normatif, Pasal 115 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 secara tegas mengklasifikasikan tempat proses belajar mengajar sebagai tatanan KTR mutlak yang wajib bebas dari kegiatan merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Di tingkat lokal institusi, kewajiban ini diturunkan melalui Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang memandatkan seluruh civitas akademika UBB untuk menjaga zonasi bebas asap rokok di area kampus.

Meskipun mahasiswa memahami definisi dasar KTR, temuan wawancara pada Informan 4 mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan (gap) antara tingkat pemahaman teoretis dan kepatuhan faktual di lapangan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami et al. (2021), yang menemukan bahwa pengetahuan mahasiswa yang tinggi mengenai aturan KTR di perguruan tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan perilaku merokok jika tidak didukung oleh pembatasan ruang fisik yang jelas. Hal ini diperkuat oleh studi Kurniawan dan Widjaja (2020), yang menegaskan bahwa efektivitas pemahaman KTR sangat bergantung pada kejelasan sosialisasi zonasi. [10]

2. Urgensi dan Rasionalisasi Implementasi KTR di Tatanan Perguruan Tinggi

Para informan menyampaikan berbagai argumen mendasar mengenai pentingnya penerapan KTR di Universitas Bangka Belitung. Informan 1, 3, dan 4 menekankan alasan kesehatan dan kenyamanan, di mana asap rokok dinilai sangat mengganggu kelancaran proses

[10] Mardhiah and Sitio.

belajar-mengajar dan merugikan perokok pasif. Informan 2 memberikan perspektif yang lebih luas, yaitu pencegahan risiko kebakaran, menjaga keasrian lingkungan kampus, serta membentuk citra UBB sebagai perguruan tinggi yang sadar kesehatan dan inklusif. Sementara itu, Informan 5 menggarisbawahi bahwa kampus adalah tatanan publik yang dihargai oleh berbagai elemen masyarakat (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan), sehingga norma kebersihan udara wajib dijaga.Pandangan para mahasiswa mengenai urgensi KTR ini sejalan dengan mandat konstitusional dan peraturan perundang-undangan kesehatan.

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam tatanan kesehatan publik, Pasal 73 PP No. 109 Tahun 2012 menetapkan bahwa penetapan KTR bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat asap rokok serta mewujudkan kualitas udara yang bersih.Secara akademis, temuan ini sejalan dengan penelitian Öberg et al. (2011) dalam jurnal The Lancet, yang membuktikan secara empiris bahwa paparan second-hand smoke (perokok pasif) di area publik menyumbang beban penyakit kardiovaskular dan respiratori yang signifikan pada kelompok usia muda. Dalam konteks perguruan tinggi, penelitian Lestari et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan aturan KTR di kampus merupakan pilar utama dalam mewujudkan konsep Green Campus. Kehadiran KTR tidak hanya melindungi perokok pasif dari bahaya zat karsinogenik, tetapi juga membentuk budaya organisasi perguruan tinggi yang mendukung etika lingkungan hidup dan kesehatan kolektif.[11]

3. Keterkaitan Hak Atas Lingkungan Sehat dan Kewajiban Mematuhi Aturan KTR

Seluruh informan (Informan 1–5) secara konsisten menyatakan bahwa antara hak mahasiswa untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan kewajiban untuk mematuhi KTR memiliki hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan dan berimbang. Informan 2 dan 3 menekankan bahwa hak menikmati udara bersih baru dapat terwujud apabila setiap individu secara disiplin menjalankan kewajibannya untuk tidak merokok di sembarang tempat. Informan 1 dan 5 menambahkan bahwa kewajiban mematuhi KTR merupakan bentuk nyata dari penghormatan terhadap hak asasi mahasiswa lain agar tidak terpapar bahaya asap rokok.Secara filosofis dan yuridis, pandangan mahasiswa ini merefleksikan prinsip dasar hukum administrasi dan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak untuk hidup. Namun, pelaksanaan hak tersebut dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran.[12]

Di dalam jurnal ilmiah, konsep keseimbangan hak dan kewajiban dalam implementasi KTR dikaji secara mendalam oleh Sari dan Handayani (2020). Mereka menemukan bahwa persepsi positif mahasiswa terhadap KTR terbentuk ketika mereka memahami bahwa pembatasan merokok bukanlah bentuk diskriminasi atau pengekangan kebebasan personal, melainkan sebuah instrumen perlindungan hak asasi bersama. Hal ini didukung oleh studi Prabandari et al. (2019), yang menjelaskan bahwa dalam tatanan universitas, keberhasilan KTR ditentukan oleh transformasi norma sosial (social norms). [13]

---

[11] Reno Renaldi, 'Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru No Smoking Area Policy Implementation On Student In Pekanbaru Hang Tuah Institude Of Health', *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 2.5 (2013), 233–38.

[12] Ferida Battling and others, 'Open Access Open Access', *Journal of Multidiciplinary Applied Natural Science*, 1.1 (2021), 1–12.

[13] Fredina Kurnia Lende, 'Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia', *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian*

4. Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelanggaran KTR di Area Kampus UBB

Tanggapan seluruh informan terhadap mahasiswa yang tetap merokok di area KTR UBB bernada kritis dan korektif. Informan 2 menilai tindakan tersebut mencerminkan minusnya kesadaran hukum, etika, dan empati sosial, karena merampas hak orang lain atas udara bersih. Informan 4 dan 5 mengidentifikasi bahwa perilaku ini melemahkan efektivitas aturan kampus dan menunjukkan sikap ketidakpatuhan. Terkait penanganannya, Informan 1, 3, dan 4 berpendapat bahwa tindakan awal yang paling tepat dilakukan oleh sesama mahasiswa adalah memberikan teguran langsung secara sopan agar pelaku berpindah ke area yang diizinkan.Pelanggaran KTR di lingkungan perguruan tinggi pada dasarnya merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam tatanan hukum administrasi kampus.

Menurut Pasal 115 ayat (2) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, pemerintah daerah dan pengelola tempat kerja/umum wajib menyediakan dan mengawasi pelaksanaan KTR. Ketidakpatuhan individu terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana denda/administratif sesuai Pasal 199 UU No. 36 Tahun 2009 (atau peraturan daerah terkait KTR setempat), serta sanksi etik berdasarkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Bangka Belitung.[14]Penelitian oleh Rahmadani dan Fitriani (2022) menguraikan bahwa maraknya pelanggaran KTR di kalangan mahasiswa dipengaruhi oleh kuatnya peer pressure (tekanan kelompok sebaya) dan rendahnya pengawasan di area-area tersembunyi.

Pelanggar kerap memanfaatkan celah pengawasan di gazebo atau parkiran kampus (Siregar & Hasanah, 2023). Oleh karena itu, temuan wawancara yang menunjukkan pentingnya peran kontrol sosial antar-mahasiswa (peer enforcement) didukung oleh riset Puspita dan Anggraini (2023), yang menyimpulkan bahwa teguran langsung dari sesama rekan (peer warning) jauh lebih efektif dalam menghentikan pelanggaran seketika dibandingkan sanksi formal yang jarang dieksekusi.[15]

5. Strategi Penegakan Aturan, Edukasi, dan Pemosisian Sanksi bagi Pelanggar KTR

Mengenai mekanisme penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar KTR di UBB, kelima informan menyepakati pendekatan bertahap yang bersifat edukatif dan persuasif sebelum menerapkan sanksi tegas. Informan 2, 4, dan 5 menyarankankan skema penanganan bertahap: diawali dengan sosialisasi zonasi KTR yang jelas, pemberian edukasi, teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemanggilan dan pelaporan ke pengawas/Satgas KTR UBB untuk pemberian sanksi administratif. Seluruh informan menekankan bahwa sanksi harus ditegakkan secara konsisten, adil, dan berlaku bagi seluruh civitas akademika tanpa tebang pilih.[16]Skema penegakan secara bertahap ini selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (General Principles of Good Administration) serta prinsip penegakan hukum pidana/administrasi dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hukum administrasi, penerapan sanksi teguran lisan dan tertulis merupakan bentuk sanksi administratif bertahap sebelum dijatuhkannya sanksi yang lebih berat (seperti pencabutan hak/fasilitas akademik).serta kesadaran kolektif seluruh civitas akademika.

Masyarakat Indonesia (JIPMI), Vol. 2.3 (2023), 56–60.

[14] Heni Trisnowati and Sri Sunarti, 'Optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok', *Medika Respati*, 11.1 (2016), 15–21 <https://www.researchgate.net/profile/Heni-Trisnowati-2/publication/316738825_Peran_Mahasiswa_dalam_Penerapan_Kawasan_Tanpa_Rokok/links/5910278a458515978187601a/Peran-Mahasiswa-dalam-Penerapan-Kawasan-Tanpa-Rokok.pdf>.

[15] Mozaik Desa, Pematang Serai, and Langkat Perspektif, 'NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ى ل ع ق ا ب ش د ي د ع م و لا ع د ت ن ع ل ى ا ل ث ا و ن و ا الله ع ر ق و ى و ت لا ب ا و ن و ا و لا ع و تلا', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.4 (2022), 1483–90.

[16] Program Studi and others, 'Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Daniel Happy Putra', *Health Information Management Journal ISSN*, 8.1 (2020), 2655–9129.

Peraturan PP No. 109 Tahun 2012 Pasal 50 juga memandatkan bahwa pimpinan atau pengelola tatanan pendidikan wajib melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan atas pelanggaran KTR di wilayahnya.Ulasan akademis oleh Prasetyo dan Indrawati (2023) menegaskan bahwa efektivitas KTR di kampus tidak ditentukan oleh seberapa berat sanksi yang tertulis di atas kertas, melainkan oleh kepastian dan konsistensi penegakannya (certainty of enforcement). Kebijakan KTR yang hanya memuat ancaman sanksi tanpa diimbangi sistem pemantauan yang aktif cenderung diabaikan). Sejalan dengan saran Informan 4 dan 5, studi Mubarak et al. (2022) dan Fadilah dan Iskandar (2023) menyimpulkan bahwa penegakan KTR yang ideal harus mengombinasikan tiga elemen kunci: (1) kejelasan media informasi/sosialisasi di seluruh penjuru kampus, (2) keberadaan Satgas pengawas yang aktif, dan (3) pemberian sanksi disiplin bertahap yang proporsional.[17]

D. Penutup

1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) pada dasarnya memiliki tingkat pemahaman yang baik mengenai konsep dan fungsi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai instrumen perlindungan hak atas udara bersih dan lingkungan belajar yang sehat. Pemahaman ini didasarkan pada landasan hukum nasional (UU No. 36 Tahun 2009 jo. PP No. 109 Tahun 2012) serta aturan internal perguruan tinggi (Peraturan Rektor UBB No. 10 Tahun 2019). Meskipun pemahaman teoretis mahasiswa tergolong memadai, masih ditemukan kesenjangan (*gap*) dengan kepatuhan faktual di lapangan. Pelanggaran masih marak terjadi di area tersembunyi seperti gazebo dan parkiran akibat dorongan *peer pressure*, minimnya penanda/marka zonasi KTR yang mencolok, serta belum optimalnya pengawasan. Keberhasilan implementasi KTR di UBB memerlukan penguatan kontrol sosial (*peer enforcement*), kejelasan sosialisasi zonasi fisik, keberadaan Satgas pengawas yang aktif, serta skema sanksi administratif bertahap yang konsisten dan proporsional. Oleh karena itu, penegakan regulasi KTR tidak hanya berdampak pada kepatuhan aturan formal, tetapi juga berpotensi membangun budaya akademik yang lebih beretika dan peduli terhadap kesehatan lingkungan. Komitmen bersama antara pengelola kampus dan seluruh civitas akademika menjadi kunci utama dalam mewujudkan lingkungan.

2. Saran

Dari penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

a. Penyempurnaan Marka dan Zonasi Fisik: Pihak pengelola Universitas Bangka Belitung perlu memasang papan penanda/marka KTR yang jelas, tegas, dan mencolok di setiap titik strategis kampus, termasuk gazebo, kantin, dan area parkir.

[17] Vivi Lutfianah, Cahyadin Cahyadin, and Hanafi Hanafi, 'Sikap Civitas Akademika Tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kampus', *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6.2 (2025), 7385–92 <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.45559>.

b. Pembentukan dan Pengaktifan Satgas KTR: Universitas perlu membentuk atau mengoptimalkan Satuan Tugas (Satgas) Pengawas KTR yang berwenang melakukan pemantauan berkala dan penindakan di area-area tersembunyi.
c. Penerapan Sanksi Bertahap yang Konsisten: Penegakan sanksi harus dijalankan secara bertahap (edukasi, teguran lisan, teguran tertulis, hingga sanksi administratif) secara konsisten dan tanpa pandang bulu bagi seluruh civitas akademika.
d. Mendorong Penguatan Kontrol Sosial (Peer Warning): Menumbuhkan budaya saling mengingatkan antar-mahasiswa (peer warning) sebagai instrumen kontrol sosial tercepat dan efektif dalam mencegah pelanggaran KTR di lingkungan kampus.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini, khususnya kepada:

1. Civitas Akademika Universitas Bangka Belitung, atas fasilitas, ruang akademis, dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini di lingkungan kampus.
2. Ibu Aruna Asista, M.Pd., selaku dosen pembimbing/fasilitator, yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta kritik konstruktif yang sangat berharga selama proses penyusunan naskah ilmiah ini.
3. Para Informan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung, yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi serta pandangan yang mendalam terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kampus UBB.
4. Rekan-rekan Kelompok 3 serta Seluruh Pihak yang telah memberikan kontribusi, gagasan, dan kerja sama yang baik sejak awal hingga selesainya penulisan artikel ilmiah ini.

Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum administrasi, kebijakan publik, dan kesehatan lingkungan di perguruan tinggi.Civitas Akademika Universitas Bangka Belitung, khususnya Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas dalam pelaksanaan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Alisi, Sri Umriani, and Nanda Labado, 'Hubungan Paparan Promosi Kesehatan Dengan Perubahan Perilaku Merokok Pada Mahasiswa', *Jurnal Promosi, Komunikasi & Kesehatan (SiKomKes)*, 1 (2025), 109–21

Battling, Ferida, Nilawati Uly, Achmad Muttaqien, and Zamili, 'Open Access Open Access', *Journal of Multidiciplinary Applied Natural Science*, 1 (2021), 1–12

Dandy Firatama, Aditya, Raihan Firdaus, and Efendi Pratama Putra, 'Perencanaan Ruang Gersang Menjadi Taman Edukasi Dekarbonisasi Dan Ruang Perokok Ramah Lingkungan Di Universitas Annuqayah', *Agregat*, 11 (2026), 14564–71 <https://doi.org/10.30651/ag.v11i1.31529>

Desa, Mozaik, Pematang Serai, and Langkat Perspektif, 'NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ىلَّ تلاوَ عَ لاوَ اوُ نواِ بِ لاَ تَ وَ ىَ وَ قَ رَ عَ اللَّ اوُ نواِ ثلاىَ ْ ىلَّ عَ نَّ تَ دُ علاوَ مَ عُ ْ دي ِ د شبِ اَ قع', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9 (2022), 1483–90

Lende, Fredina Kurnia, 'Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia', *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia (JIPMI)*, Vol. 2 (2023), 56–60

Lubis, Arifin Shaleh, and Putra Apriadi Siregar, 'Faktor Pendorong Perilaku Merokok Pada Mahasiswa Di Lingkungan Kampus: Pendekatan Kualitatif', *JK: Jurnal Kesehatan*, 1 (2023), 215–29

Lutfianah, Vivi, Cahyadin Cahyadin, and Hanafi Hanafi, 'Sikap Civitas Akademika Tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kampus', *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6 (2025), 7385–92 <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.45559>

Mardhiah, Ainal, and Roma Sitio, 'PENERAPAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KAMPUS SEBAGAI PROSES BERKELANJUTAN : STUDI KUALITATIF', 3 (2026), 493–506

Nur Hidayat, Wildan, Sabillah Nur Fadillah Fadillah, Shidik Wahidun Alqomar Alqomar, Nia Muthoharoh Muthoharoh, and Dalima Septiria Septiria, 'Manajemen Kawasan Tanpa Rokok Berbasis Pendidikan Islam Di Perguruan Tinggi', *JMiE (Journal of Management in Education)*, 10 (2025), 69–82 <https://doi.org/10.30631/jmie.2025.102.69-82>

Renaldi, Reno, 'Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru No Smoking Area Policy Implementation On Student In Pekanbaru Hang Tuah Institude Of Health', *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 2 (2013), 233–38

Setianingsih, Yana Agus, Endang Wahyati, and Widyorini Endang, 'Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sebagai Bagian Dari Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus Pada STIKES Di Kota Semarang)', *Jurnal Hukum Kesehatan*, 1 (2020), 106–14

Simangunsong, Rizky Aulia, Dea Hamiche Putri, Rahmadani Purba, and Sri Hajijah Purba, 'Analisis Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Kampus UINSU Tuntungan', *Indonesian Journal of Health Science*, 4 (2024), 324–31 <https://doi.org/10.54957/ijhs.v4i4.916>

Studi, Program, Rekam Medis, Informasi Kesehatan, and Ilmu-Ilmu Kesehatan, 'Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Daniel Happy Putra', *Health Information Management Journal ISSN*, 8 (2020), 2655–9129

Suwarni, Linda, 'Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia', 1 (2015), 46–53

Trisnowati, Heni, and Sri Sunarti, 'Optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam Penerapan Kawasan

Tanpa Rokok', *Medika Respati*, 11 (2016), 15–21 <https://www.researchgate.net/profile/Heni-Trisnowati-2/publication/316738825_Peran_Mahasiswa_dalam_Penerapan_Kawasan_Tanpa_Rokok/links/5910278a458515978187601a/Peran-Mahasiswa-dalam-Penerapan-Kawasan-Tanpa-Rokok.pdf>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.